Bawaslu Diminta Pantau Kampanye di Medsos

SLEMAN (KR) - Komisi A DPRD Kabupaten Sleman meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman untuk memantau kampanye yang menggunakan media sosial (medsos). Dengan harapan dalam kampanye tidak ada keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menggunakan fasilitas APBD.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman Ani Martanti ST mengatakan, pada masa pandemi ini, para calon bupati dan wakil bupati dalam melakukan kampanye tidak leluasa. Kemudian para calon memanfaatkan medsos sebagai media untuk kampanye.

"Memang saat ini medsos menjadi media kampanye yang cukup efektif. Soalnya untuk mengumpulkan massa dengan jumlah yang banyak tidak boleh," kata Ani Martanti kepada *KR*, Jumat (23/10).

Untuk itu, Komisi A meminta Bawaslu Sleman supaya memantau akun-akun yang digunakan oleh para calon. Hal itu untuk memastikan dalam kampanye tidak ada keterlibatan ASN dan memanfaatkan dana APBD. "Kami tidak ingin, Pilkada ini dicederai adanya keterlibatan ASN ikut kampanye. Selain itu calon memanfaatkan APBD untuk kampanye. Makanya kami minta akun-akun medsos harus dipantau oleh Bawaslu," pintanya.

Di samping itu, pihaknya juga meminta kepada KPU Sleman untuk giat melakukan sosialisasi di pelosok-pelosok. Dirinya mendapat informasi, masyarakat yang berada di pinggiran belum mendapat sosialisasi tentang Pilkada dari KPU. "Masyarakat yang ada di pinggiran itu, baru mendapat sosialisasi dari calon. Sementara dari KPU belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam sosialisasi itu, masyarakat perlu tahu calon yang maju dalam Pilkada ini siapa saja. Kemudian cara memungut suara pada 9 Desember mendapat sistemnya seperti apa. "Kalau yang melakukan sosialisasi dari KPU kan pasti akan lebih detail dan jelas," ucapnya. **(Sni)** -f

BAWASLU TERUS MENDATA JUMLAH PELANGGARAN

Sebagian APK Masih Ada yang Ditempel di Pohon

SLEMAN (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman masih mendata Alat Peraga Kampanye (APK) yang melakukan pelanggaran. Dari pantauan Bawaslu Sleman, kebanyakan pelanggaran terjadi karena tata cara pemasangan APK, jumlah APK yang melebihi dan desain yang tidak sesuai.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman M Abdul Karim Mustofa menerangkan, terkait jumlah APK yang melakukan pelanggaran, pihaknya belum bisa menyebutkan jumlah pasti. Dari Panwascam masih proses mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventarisir dan mendata kembali. Karena dalam beberapa kali pembaharuan sudah ada perubahan jumlah di lapangan. "Jadi nanti sebelum menjelang penertiban kami update lagi. Kami akan sampaikan rekomendasi ke KPU Sleman," ujar Karim kepada *KR*, Jumat (23/10).

Menurut Karim, dari pantauan di lapangan, pelanggaran yang ditemukan yakni tata cara pemasangan. Misalnya APK yang ditempel di pohon. Jumlah APK yang tidak sesuai ketentuan hingga desain APK yang tidak sesuai. Mekanisme selanjutnya, Bawaslu akan mengingatkan ke pasangan calon (paslon) dalam waktu 1x24 jam. Jika tidak diindahkan nanti akan dikoordinasikan dengan Bawaslu Sleman dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditertibkan.

"Yang menjadi pondasi pemasangan APK tidak difasilitasi oleh pihak pemerintah, kesehatan, pendidikan dan tempat ibadah. Pada prinsip semua tempat bisa dilakukan pemasangan. Hanya saja cara pemasangan yang harus menjadi kebutuhan penting agar tidak terjadi dugaan pelanggaran administrasi," tandas Karim, seraya menambahkan, nantinya Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tiga kali penertiban . Di bulan Oktober, November dan masa tenang. **(Aha)-f**

Lima Bioskop Ajukan Rekomendasi

SLEMAN (KR) - Semenjak pandemi Covid-19, bioskop yang ada di Sleman berhenti beroperasi. Sejauh ini lima bioskop di Kapanewon Sleman, Mlati dan Depok belum mendapatkan surat rekomendasi dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman.

Jubir Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman Shavitri Nurmala Dewi menerangkan, bioskop yang ada di Sleman saat ini sudah mengajukan rekomendasi untuk bisa beroperasi kembali. "Kami belum bisa memastikan kapan bioskop di Sleman akan beroperasi. Mengingat proses pengajuan rekomendasi masih berlangsung. Belum ada rekomendasi yang diturunkan. Bioskop belum ada yang buka," jelasnya kepada *KR*, Jumat (23/10).

Terpisah, Head of Sales and Marketing CJ CGV Cinemas Manael Sudarman mengaku belum mendapatkan rekomendasi izin untuk beroperasinya bioskop CGV. Pihaknya sudah mengupayakan dan mengajukan rekomendasi tersebut kepada gugus tugas Kabupaten Sleman. "Meski belum beroperasi, kami sudah menyiapkan protokol kesehatan," tandasnya.

Manael juga masih memperhitungkan untung-rugi dan masih menjadi pembahasan internal. Kalau nantinya bioskop bisa beroperasi kembali, potensi sales harus dapat mengkaver biaya yang akan dikeluarkan. "Hal ini berkaitan dengan kapasitas yang diperbolehkan, penjualan produk makanan dan interest masyarakat," tandasnya.

Manael berharap, dari sisi regulator dapat segera memberikan izin operasional bioskop. Mengingat saat ini juga menjadi momentum bagi pemilik konten lokal atau impor untuk bisa mendistribusikan konten ke bioskop. **(Aha)-f**

Bank BPD DIY Cabang Sleman Gowes Bareng

KR-Istimewa

Keseruan gowes bareng ASN Sleman dan Bank BPD DIY.

SLEMAN (KR) - Sejumlah ASN Pemkab Sleman bersama dengan karyawan serta pimpinan Bank BPD DIY Cabang Sleman melakukan gowes bareng. Kegiatan yang diinisiasi Bank BPD DIY Cabang Sleman ini menempuh jarak 13 km, dengan start dari kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman.

Kepala BKPP Sleman Priyo Handoyo merasa gembira dengan diadakannya kegiatan gowes bareng ini. Selain sebagai ajang rekreasi, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kebugaran tubuh, terutama di tengah masa pandemi seperti saat ini. "Semoga ini bisa jadi agenda rutin," katanya.

Sementara Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Sleman Efendy Sutopo Yuwono mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya Bank BPD DIY Cabang Sleman untuk menjalin silaturahmi dengan ASN di lingkungan Pemkab Sleman. "Kegiatan tersebut juga untuk mensosialisasikan program Bank BPD DIY untuk mengelektronifikasi semua jenis transaksi di tahun 2021 nanti. Tadi setelah sampai di sini, semua diminta untuk aktivasi mobile bankingnya. Karena kami ingin semuanya dielektronifikasi. Tahun 2021 harus 100 persen elektronifikasi," ungkapnya. **(Has)-f**

DUKUNG PROGRAM PLP2B

Revitalisasi Irigasi Diperbanyak

SLEMAN (KR) - Anggaran untuk revitalisasi saluran irigasi dan sumur bor di lahan pertanian di Kabupaten Sleman perlu ditingkatkan. Hal itu bagian untuk mendukung program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di wilayah Sleman.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman M Zuhdan SPd mengaku sering mendapat keluhan dari petani di bagian selatan, sering kurang mendapat air irigasi. Hal itu dikarenakan adanya saluran irigasi yang bocor akibatnya air tidak mengalir sampai ke selatan. "Daerah Moyudan maupun Godean di sisi selatan itu sering mengeluh kekurangan air irigasi. Soalnya air tidak sampai ke selatan. Pemicunya saluran irigasi banyak yang bocor," kata Zuhdan kepada *KR*, Jumat (23/10).

Menurutnya, Kabupaten Sleman ini menetapkan sekitar 18.000 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun dalam satu sisi, masih ada wilayah yang belum bisa mengakses air irigasi secara optimal. Akibatnya petani tidak bisa menanam secara maksimal. "Artinya ketika sudah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan para petani. Harapannya target ketersediaan pangan atau hasil produksi bisa tercapai," ujarnya.

Zuhdan mendorong eksekutif supaya anggaran revitalisasi saluran irigasi dan pembuatan sumur bor di lahan pertanian ditingkatkan. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan air irigasi bagi petani. "Kami minta anggaran revitalisasi saluran irigasi dan pembuatan sumur bor di lahan pertanian ditambah dalam APBD 2021," pintanya. **(Sni)-f**

PRESIDEN PADA DIES KE-57 FAK KEHUTANAN UGM

Teknologi Digital untuk Kemajuan Kehutanan

SLEMAN (KR) - Presiden Joko Widodo meminta Fakultas Kehutanan UGM untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi di era disrupsi saat ini dan membajak disrupsi untuk lompatan kemajuan kehutanan Indonesia. Salah satu solusi yang patut diperhitungkan adalah penggunaan teknologi digital dengan *precision forestry* yang memanfaatkan *big data* dan kecerdasan buatan.

"Saya yakin Fakultas Kehutanan UGM bisa mengembangkan inovasi-inovasi tersebut. Teruslah memberi kontribusi bagi kemajuan Indonesia," kata Presiden saat menyampaikan arahan dalam puncak peringatan Dies Natalis ke-57 Fakultas Kehutanan UGM secara daring, Jumat (23/10).

Menurut Presiden, ilmu kehutanan memiliki posisi sentral dalam mengelola hubungan antara masyarakat dan alam, khususnya antara masyarakat dan hutan yang mengalami proses evolusi peran dan kontribusi. Pada masyarakat tradisional, hutan menjadi penyedia kebutuhan dasar masyarakat hutan di sekitarnya seperti makanan dan obat-obatan. Pada masyarakat agraris, hutan menjadi area perluasan bagi kegiatan pertanian dan peternakan. Pada masyarakat industri, hutan berperan sebagai sumber bahan baku industri. Pada masyarakat pascaindustri, hutan berperan sebagai basis pelayanan masyarakat terutama air bersih, oksigen, dan biodiversitas. "Kita saat ini dalam posisi tarik-menarik berkepanjangan antara hutan konsep agraris, industri dan pascaindustri," ujarnya.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pidato berjudul 'Dukungan Sektor Kehutanan untuk Kedaulatan Pangan Nasional' menyatakan, sektor kehutanan berperan penting dalam ketahanan nasional. Hutan menjadi wadah utama pemenuhan kebutuhan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan *(food security)*, kemandirian pangan *(food resilience)* terutama kedaulatan pangan *(food sovereignity)*. "Ini menjadi tekad bersama mewujudkannya. Kita tidak ingin negara kita goyah karena kelangkaan pangan," kata Prabowo. Kedaulatan pangan nasional sepenuhnya harus didukung sumber daya lahan yang cukup, sumber daya manusia yang tangguh serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. **(Dev)**-f

HADAPI LIBUR PANJANG

Satpol PP DIY Tambah Personel

YOGYA (KR) - Menyambut libur panjang pekan depan sejumlah upaya dan persiapan sudah dilakukan oleh Satpol PP DIY. Diantaranya Satpol PP DIY akan menerjunkan personelnya ke sejumlah tempat wisata guna memastikan wisatawan sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Karena hanya dengan penegakkan protokol kesehatan, adanya penularan atau klaster baru yang berasal dari pariwisata bisa dicegah sejak dini.

"Guna mengantisipasi adanya kenaikan jumlah wisatawan dan mengantisipasi adanya penularan Covid-19. Saat libur panjang nanti kami akan mengerahkan 459 personel dimana di dalamnya termasuk pasukan Satlinmas Rescue Istimewa.Selain itu nantinya akan ditambah 80 personel TNI Polri yang bergabung dalam operasi gabungan," kata Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, Jumat (23/10).

Noviar mengatakan, guna memudahkan pemantauan dan pengawasan ratusan personel gabungan itu rencananya akan disebar penempatannya ke seluruh wilayah DIY. Adapun untuk fokusnya adalah objek wisata sebanyak 64 titik. Sedangkan untuk diperkotaan nanti akan difokuskan di Kawasan Malioboro.

Adapun untuk operasi rencananya akan menyasar sektor perhotelan. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah para pengelolanya telah benar-benar menyaring pengunjung atau tidak. "Supervisi kita setiap hari akan melakukan pengecekan di hotel, di tempat wisatawan menginap. Apakah dari pihak hotel sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan meminta hasil rapid test atau PCR wisatawan dari zona merah,"jelasnya.

Sementara itu kasus positif Covid-19 di DIY kembali mencatatkan kenaikan kasus positif sebanyak 28 kasus, dengan demikian total kasus terkonfirmasi menjadi 3.462 kasus. Kenaikan jumlah tambahan kenaikan kasus terkonfirmasi tersebut di DIY sebagian besar sebanyak 14 kasus dari hasil kontak tracing dan 8 kasus masih dalam penelusuran.

"Kasus positif Covid-19 yang baru kembali mengalami kenaikan sebesar 28 kasus yang tercatat sebagai kasus 3.440 hingga kasus 3.467. Tambahan kasus terkonfirmasi positif tersebut sebagian besar 14 orang berdomisili di Bantul dan 12 orang di Sleman," ujar Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Korona Berty Murtiningsih. **(Ria/Ira)-f**